

KEMISKINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA : TANTANGAN DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Galih Nugraha¹; Dede Sri Rahayu²; Aso Sukarso³

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya^{1,2,3}

Email: galihnugraha@unsil.ac.id^{1*}

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh kemiskinan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada periode 2020–2023. Dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, data diperoleh dari 38 provinsi di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IPM, sedangkan TPAK tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan menjadi kendala utama pembangunan manusia melalui keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Sebaliknya, pengaruh TPAK terhadap IPM bergantung pada kualitas pekerjaan yang tersedia dan distribusi pendapatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi ketimpangan antarwilayah, dengan tujuh provinsi memiliki IPM kategori sedang (<70). Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan berbasis wilayah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pekerjaan, dan penguatan infrastruktur sosial-ekonomi guna mendukung pembangunan manusia yang merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); Kemiskinan; Pembangunan Manusia

ABSTRACT

This study analyzes the impact of poverty and Labor Force Participation Rate (LFPR) on the Human Development Index (HDI) in Indonesia during the 2020–2023 period. Using descriptive and verification methods, data were obtained from 38 provinces in Indonesia. The results show that poverty has a significant negative effect on HDI, while LFPR does not have a significant partial effect. This indicates that poverty is the main barrier to human development through limited access to education and healthcare services. Conversely, the influence of LFPR on HDI depends on the quality of available jobs and equitable income distribution. The study also identifies regional disparities, with seven provinces categorized as having a medium HDI (<70). The implications of this study highlight the importance of region-based policies for poverty alleviation, improving job quality, and strengthening social and economic infrastructure to support equitable and sustainable human development.

Keywords : Human Development Index (HDI); Labor Force Participation Rate (LFPR); Poverty; Human Development

PENDAHULUAN

Pembangunan dianggap sebagai suatu proses perubahan secara kontinu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, secara material maupun spiritual (Putri et al., 2024). Federova et al., (2024);Purbayati et al., (2022) menyatakan bahwa paradigma

pembangunan saat ini lebih komprehensif dan berpusat pada manusia, tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan yang optimal adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik dan berkesinambungan (Purbayati et al., 2021); (Dewi et al., 2024); (Federova et al., 2024). Putri et al., (2024) juga menyatakan bahwa indikator yang dipilih dalam pengukuran kualitas hidup manusia yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, IPM bagian dari perencanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan memberikan panduan bagi alokasi sumber daya dan implementasi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif (Federova et al., 2024).

Indeks Pembangunan Manusia memberikan gambaran holistik tentang kualitas hidup dan kemajuan suatu negara, memungkinkan perbandingan antar negara serta pemantauan perubahan dalam waktu yang berkelanjutan (Federova et al., 2024). IPM merupakan alat yang esensial untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan manusia sekaligus memberikan panduan bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai alat pengukur, IPM juga mencerminkan tingkat komitmen suatu negara terhadap kesejahteraan masyarakatnya (Juniwati & Rivanda, 2023). Indeks ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang layak dengan memperhitungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kehidupan ekonomi (Ginting & Lubis, 2023).

IPM dihitung berdasarkan beberapa indikator, termasuk angka harapan hidup sebagai ukuran kesehatan, tingkat melek huruf untuk menilai pendidikan, dan daya beli sebagai indikator standar hidup yang layak (Putri et al., 2024). Pratama & Mandai (2023) juga menggambarkan IPM di masyarakat yang dapat memanfaatkan proses pembangunan dalam bidang pendidikan, pendapatan, kesehatan, dan aspek lainnya. Peningkatan kualitas hidup manusia menjadi tujuan utama dalam kebijakan pembangunan Indonesia (Suhendi & Astuti, 2023). Namun, masih belum meratanya kualitas layak hidup penduduknya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020-2023, terdapat tujuh provinsi dengan IPM yang berada dalam kategori sedang, yakni dengan nilai IPM kurang dari 70.

Kemiskinan dapat berdampak buruk pada pembangunan manusia (Suhendi & Astuti, 2023). Federova et al. (2024) menyatakan bahwa kemiskinan dapat dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi IPM. Kemiskinan adalah kondisi individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti sandang, pangan, papan,

layanan kesehatan, dan pendidikan (Pratama & Mandai, 2023). Kemiskinan memberikan dampak signifikan terhadap IPM karena berbagai faktor dan menghambat akses terhadap layanan Kesehatan dan pendidikan yang memiliki kualitas (Ulfatussaniah et al., 2024). Selain itu juga, anak-anak dari keluarga kurang mampu cenderung memiliki keterbatasan sumberdaya untuk mengakses pendidikan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ulfatussaniah et al., 2024).

Dari perspektif indikator capaian IPM melalui standar hidup yang layak, TPAK menjadi salah satu faktor penentu output perekonomian dan indikator kesejahteraan dalam penilaian IPM (Nastiti & Nailufar, 2024). Faelassuffa & Yuliani (2022) menyatakan bahwa TPAK menjadi bagian dalam indikator kesejahteraan dalam penilaian IPM. Selain itu, Nastiti & Nailufar (2024) menjelaskan bahwa TPAK mengacu pada penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, dalam kondisi saat ini sedang bekerja maupun mencari pekerjaan dan memberikan gambaran relatif mengenai ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan Cahyanti et al., (2021) menyatakan bahwa tingginya TPAK yang terserap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan pendapatan individu akan berkontribusi pada kenaikan daya beli, sehingga mendukung tercapainya standar hidup yang layak. Ketika tenaga kerja menerima upah yang lebih tinggi, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat (Nastiti & Nailufar, 2024). Potensi penduduk untuk bekerja cenderung meningkat seiring dengan tingginya jumlah angkatan kerja (Faelassuffa & Yuliani, 2022a). Cahyanti et al., (2021) bahwa ketika TPAK terserap secara optimal, hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup individu dalam aspek kesehatan, standar hidup yang layak, dan pendidikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kemiskinan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik secara parsial maupun secara simultan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Federova et al. (2024) memaparkan IPM merupakan bagian dari indikator untuk mengukur tingkat pembangunan suatu negara berdasarkan komponen – komponen utama yang terdiri dari tiga komponen yaitu standar hidup, pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, IPM mencerminkan konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama, bukan sekadar sarana dalam proses pembangunan (Oktaviani et al., 2024).

IPM bertujuan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kehidupan ekonomi Masyarakat (Federova et al., 2024). Adapun beberapa aspek akan diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan dinilai melalui indikator kesehatan secara menyeluruh dan umur panjang yang meliputi tingkat harapan hidup serta kualitas kesehatan Masyarakat.
2. Aspek pendidikan diukur menggunakan indikator seperti angka harapan sekolah, tingkat partisipasi pendidikan, dan rata-rata lama pendidikan. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai akses, keterlibatan, serta durasi pendidikan yang diterima oleh Masyarakat.
3. Aspek ekonomi diperhitungkan dengan melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pengukuran ini mencakup rata-rata pengeluaran perkapita sebagai indikator kemampuan ekonomi masyarakat.

Maka dari itu, (Federova et al., 2024) menyatakan bahwa IPM dapat dinilai dari data yang melibatkan empat kriteria utama sebagai berikut:

1. Angka harapan hidup menggambarkan kesehatan populasi dan berfungsi sebagai indikator umur panjang.
2. Tingkat melek huruf mencerminkan pendidikan dan kemampuan membaca serta menulis dalam suatu populasi. Rata-rata lamanya bersekolah juga dihitung untuk mengukur tingkat pendidikan dalam masyarakat.
3. Kemampuan daya beli merupakan pendekatan berbasis pendapatan untuk menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonom.

Melalui penggabungan komponen, IPM memberikan gambaran holistik tentang tingkat pembangunan suatu daerah atau negara (Maulana et al., 2024). Indeks ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi penduduknya dengan memperhitungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Maulana et al., 2024). Ulfatussaniah et al., (2024) menyatakan pengukuran capaian IPM antar wilayah terdiri

dari 4 kategori, yaitu: (1) $IPM < 60$: IPM rendah, (2) $60 < IPM < 70$: IPM sedang, (3) $70 < IPM < 80$: IPM tinggi, dan (4) $IPM > 80$: IPM sangat tinggi.

Kemiskinan

Pratama & Mandai (2023) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan kesejahteraan yang mencakup berbagai dimensi, seperti rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, terbatasnya akses terhadap sanitasi dan air bersih, kurangnya keamanan fisik, minimnya suara dan kapasitas untuk berpartisipasi, serta terbatasnya peluang untuk memperbaiki kualitas hidup. Kemiskinan memiliki banyak dimensi dan perumusan definisinya sering kali menjadi tantangan baik secara konseptual maupun praktis dalam menentukan siapa yang tergolong sebagai penduduk miskin. Selain itu, masyarakat miskin umumnya menghadapi keterbatasan akses ke pasar serta kualitas infrastruktur yang rendah (Irawan, 2022).

Kemiskinan merupakan keadaan di mana individu atau kelompok, perempuan atau laki – laki yang memiliki keterbatasan dalam menunaikan hak dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan (Rifa & Waluyo, 2023). Hak dasar mencakup akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan, rasa aman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Maharani & Yuliana, 2023). Federova et al., (2024) menyatakan bahwa kemiskinan digambarkan sebagai kondisi kekurangan dalam aspek materi, kebutuhan sosial, pendapatan, serta akses terhadap berbagai sumber daya. Khairunnisa et al., (2023) menyatakan ada empat pola kemiskinan sebagai berikut:

1. Kemiskinan persisten: Berlangsung terus-menerus atau berkurang secara perlahan.
2. Kemiskinan siklikal: mengikuti siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. Kemiskinan sementara, umumnya dialami dalam periode tertentu.
4. Kemiskinan akibat bencana, peristiwa seperti kekerasan, konflik, kebijakan, bencana alam yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Maulina & Andriyani (2020) mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk yang telah atau sedang bekerja, mencari pekerjaan, melaksanakan aktivitas lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Selain itu, Maulina & Andriyani (2020) memaparkan angkatan kerja mencakup penduduk diatas 10 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam proses produksi. Sedangkan, Faelassuffa & Yuliani (2022)

menyatakan bahwa TPAK merupakan persentase dari penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja. Cahyanti et al. (2021) menyatakan bahwa TPAK merupakan persentase masyarakat yang berumur lima belas tahun ke atas yang terbilang dalam angkatan kerja. Adapun Faelassuffa & Yuliani (2022) menyatakan bahwa kegunaan TPAK mengetahui jumlah penduduk yang memiliki potensi untuk bekerja. Namun, dalam hubungannya dengan IPM menggunakan regresi nonparametrik untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, dan TPAK di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan TPAK tidak mengikuti pola yang konsisten, yang mengindikasikan bahwa TPAK mungkin tidak memiliki pengaruh langsung atau signifikan terhadap IPM (Rizaldi, 2024).

Hipotesis

1. Kemiskinan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Kemiskinan memberikan dampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

METODE PENELITIAN

Metode

Metode deskriptif dan verifikatif yang telah dilaksanakan pada penelitian ini. Menurut Rivanda et al. (2022) metode penelitian yang memiliki tujuan utama untuk membuat gambaran tentang kejadian atau situasi yaitu metode deskriptif. Sementara itu, Pakpahan et al. (2022) berpendapat bahwa metode verifikatif menguji suatu metode dapat menyelesaikan masalah yang serupa dalam kehidupan.

Variabel Operasional

Terdiri dari variabel dependent dan variable independent. Menurut Rivanda et al. (2023) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM sebagai variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persen (%). Sementar yang dimaksud variabel independent adalah variabel yang menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen (Afgani et al., 2021). Variabel independen terdiri dari kemiskinan sebagai variabel independen (X1) mengacu pada persentase penduduk miskin yang diukur dalam satuan

persen (%) dan TPAK sebagai variabel independen (X2) merujuk pada persentase penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan, diukur dalam satuan persen (%).

Populasi dan sampel

Populasi penelitian mencakup 38 provinsi di Indonesia. Metode pemilihan sampel menggunakan *non-probability* sampling dengan teknik *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria provinsi di Indonesia yang memiliki data lengkap untuk periode 2020-2023.

Analisis Deskriptif

Menurut Rivanda & Dwiastuti (2024) bahwa statistik deskriptif dipergunakan dalam memberikan gambaran variabel-variabel penelitian. Informasi yang dapat diperoleh melalui statistik deskriptif diantaranya: nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata, standar deviasi, dan jumlah (sum). Hasil dari statistik deskriptif memberikan gambaran variabel-variabel yang diteliti dengan cara menjelaskan karakteristik data dan fenomena yang terdapat pada data tersebut (Rivanda & Muslim 2021); (Ramadhan et al., 2024).

Analisis Verifikatif

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan menggunakan Q-Q Plot (Quantile-Quantile Plot) adalah metode visual untuk menilai distribusi normal atau tidak. Selanjutnya uji homogenitas, uji autokorelasi dengan melihat nilai durbin watson dan uji multikolinieritas dengan nilai variance inflation factor (VIF).

Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = a + b_1 \text{ Kemiskinan} + b_2 \text{ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)}$

Pengujian Hipotesis dan Koefisien Determinasi

Hipotesis diuji oleh uji F dan uji t. Sementara, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengevaluasi model dalam menjelaskan variansi pada variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rata-rata IPM pada periode 2020-2023 adalah 72,92%. Nilai IPM terendah tercatat di Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 61,22%, sedangkan nilai IPM tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 sebesar 83,55%.
2. Rata-rata tingkat kemiskinan pada periode 2020-2023 adalah 10,41%. Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Bali pada tahun 2020 sebesar 4,25%, sementara tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua pada tahun 2023 sebesar 27,38%.
3. Rata-rata TPAK pada periode 2020-2023 adalah 68,54%. Nilai TPAK terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 sebesar 62,15%, sedangkan nilai TPAK tertinggi tercatat di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebesar 78,29%.

Analisis Verifikatif

Uji Asumsi Klasik

Gambar 2 dan Gambar 3 menjelaskan bahwa model telah memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas. Selain itu pada uji autokorelasi, nilai durbin watson memiliki nilai p-value yang lebih dari 0,05 serta nilai vif untuk uji multikolinearitas kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan model telah memenuhi semua uji asumsi klasik.

Regresi Linear Berganda

Diperoleh persamaan berdasarkan Tabel 3 yang diuraikan dibawah ini:

$$Y = 9,761 - 0,187 \text{ Kemiskinan} - 0,077 \text{ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)}$$

Pengujian Hipotesis

Uji F

Tabel 3 menguraikan mengenai nilai F yang diperoleh adalah 55,034 dengan signifikansi 0,000. Nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel ($55,034 > 3,064$), yang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dan TPAK secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM.

Uji t

Berikut merupakan penjelasan Tabel 4 sebagai berikut:

1. Hipotesis 2: Diperoleh nilai t hitung sebesar -9,136, yang lebih kecil dari -1,977961, dengan probabilitas 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menjelaskan bahwa

kemiskinan (X1) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y).

2. Hipotesis 3: Diperoleh nilai Thitung sebesar -1,013, yang lebih besar dari -1,977961, dengan probabilitas 0,313 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y).

Koefisien Determinasi

Tabel 2 menunjukkan nilai korelasi simultan antara kemiskinan dan TPAK terhadap IPM adalah 0,673. Setelah dikuadratkan, nilai koefisien R Square diperoleh sebesar 0,453 atau 45,3%. Hal ini menjelaskan mengenai kemiskinan dan TPAK memberikan pengaruh sebesar 45,3% terhadap IPM, sementara sisanya 54,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil uji memaparkan mengenai kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Suhendi & Astuti (2023), Kartika et al., (2024), dan Putri et al., (2024) yang menyimpulkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM biasa digunakan dalam membandingkan indikator internasional, seperti harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup (Suhendi & Astuti, 2023).

Pratama & Mandai (2023) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan kesejahteraan, seperti rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, terbatasnya akses terhadap sanitasi dan air bersih, kurangnya keamanan fisik, minimnya suara dan kapasitas untuk berpartisipasi, serta terbatasnya peluang untuk memperbaiki kualitas hidup. Kemiskinan memiliki dimensi dan perumusan definisi sering kali menjadi tantangan baik secara konseptual maupun praktis dalam menentukan siapa yang tergolong sebagai penduduk miskin. Selain itu, masyarakat miskin umumnya menghadapi keterbatasan akses ke pasar serta kualitas infrastruktur yang rendah (Irawan, 2022).

Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan IPM, karena tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing dengan sumber daya lainnya (Kartika et al., 2024). Sulitnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, menstimulasi peningkatan kemiskinan dan mengesampingkan indikator sosial, seperti

kesehatan dan pendidikan (Suhendi & Astuti, 2023). Kartika et al., (2024) menyatakan bahwa kemiskinan menjadi rintangan dalam meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan. Selain itu, kemiskinan tidak hanya diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang layak akibat rendahnya penghasilan, serta kesulitan menyekolahkan anak karena kurangnya biaya. Dampaknya, pendidikan yang rendah, pengetahuan yang terbatas, dan kesehatan yang menurun dapat memperburuk kemiskinan karena menurunkan kemampuan untuk bekerja (Rivanda & Muslim 2021).

Putri et al., (2024) menjelaskan bahwa peningkatan garis kemiskinan dan ketidakmampuan manusia memenuhi kebutuhan dasar akan menciptakan rantai kemiskinan yang ditandai dengan rendahnya pendapatan nyata. Hal ini berdampak pada minimnya investasi dan menurunnya produktivitas manusia. Akibatnya, tujuan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih sukar terpenuhi, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (Suhendi & Astuti, 2023). Kartika et al. (2024) menyatakan bahwa kualitas masyarakat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, fluktuasi tingkat kemiskinan memiliki korelasi erat dengan naik turunnya IPM. Putri et al., (2024) menyatakan bahwa kemiskinan menjadikan seseorang sulit memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang baik sehingga mereka memiliki daya beli yang rendah dan akan menurunkan IPM.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil uji memaparkan mengenai TPAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan Cahyanti et al., (2021), Nastiti & Nailufar (2024), Endang & Anam (2024) yang menyimpulkan bahwa TPAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Peningkatan IPM mencerminkan ketersediaan tenaga kerja terampil yang lebih banyak di suatu wilayah (Suhendi & Astuti, 2023).

Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek secara bersamaan perannya dalam pembangunan, sehingga peran manusia menjadi variabel sasaran dan variable pembangunan (Maulana et al., 2024). Sehingga, peningkatan kualitas SDM mempengaruhi kemajuan suatu wilayah (Sakinah et al., 2023). Nastiti & Nailufar (2024) menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya TPAK terhadap IPM disebabkan oleh

rendahnya kesempatan kerja, kurangnya pendidikan yang memadai, dan terbatasnya lapangan kerja. Akibatnya, masyarakat tidak bekerja sesuai bidangnya atau memperoleh upah yang layak, sehingga tidak tercapai standar hidup yang memadai, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Endang & Anam (2024) menyatakan bahwa bahwa kualitas pekerjaan yang tersedia tidak selalu berkontribusi langsung pada peningkatan komponen IPM, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Endang & Anam (2024) menguraikan bahwa hasil yang tidak signifikan menunjukkan hubungan antara TPAK dan IPM lebih kompleks dari yang diperkirakan. Mereka menekankan bahwa pengaruh TPAK terhadap IPM dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas pekerjaan. Meskipun TPAK tinggi, jika pekerjaan yang tersedia tidak berkualitas atau memberikan penghasilan yang tidak mencukupi, sehingga kontribusinya terhadap IPM menjadi terbatas. Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan dampak TPAK terhadap IPM tidak signifikan. Struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor padat modal membatasi pengaruh TPAK terhadap IPM, karena sektor ini cenderung tidak menyerap banyak tenaga kerja meskipun berkontribusi besar terhadap PDRB (Purbayati et al., 2022). Dengan demikian, meskipun TPAK adalah indikator penting dalam dinamika pasar tenaga kerja, namun TPAK tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap IPM ketika dianalisis secara independen (Cholifah, 2024; Faelassuffa & Yuliani, 2022; Rizaldi, 2024).

Hubungan antara IPM, TPAK, dan kemiskinan, terdapat beberapa temuan penting. Pertama, peningkatan IPM cenderung berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang tercermin dalam IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Ferdi (2022) menunjukkan bahwa peningkatan IPM di Kabupaten Simeulue berdampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan yang memprioritaskan peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan.

Di sisi lain, hubungan antara TPAK dan IPM menunjukkan bahwa meskipun TPAK merupakan indikator penting dalam konteks pasar tenaga kerja, terdapat bukti bahwa TPAK secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. TPAK tidak berpengaruh secara statistik terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur, meskipun

TPAK penting untuk memahami dinamika ketenagakerjaan (Cahyanti et al., 2021). Hal ini menunjukkan, meskipun partisipasi angkatan kerja dapat berkontribusi pada aspek-aspek tertentu dari pembangunan manusia, pengaruhnya terhadap IPM tidak selalu langsung dan signifikan. Selain itu, meskipun TPAK, upah minimum, dan IPM diukur secara bersamaan, TPAK tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka yang merupakan salah satu komponen serta dapat mempengaruhi IPM (Karo, 2023). Pembahasan diatas menunjukkan bahwa faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan, mungkin memiliki pengaruh dalam menentukan nilai IPM dibandingkan dengan TPAK. Hal ini sejalan dengan temuan dari studi lain yang menekankan sifat multifaset dari IPM, yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendapatan, daripada hanya dipengaruhi oleh partisipasi angkatan kerja (Faelassuffa & Yuliani, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial. Kemiskinan terbukti menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan manusia di Indonesia, dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

TPAK merupakan indikator penting dalam pasar tenaga kerja, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dampaknya terhadap IPM tidak signifikan jika kualitas pekerjaan dan distribusi pendapatan tidak memadai. Temuan ini juga menunjukkan, adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Terdapat beberapa provinsi dengan kategori IPM rendah yang menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih fokus. Selain itu, hasil ini menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia yang merata dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan diatas, penulis menyampaikan saran untuk ikut kontribusi terhadap pengembangan kebijakan maupun penelitian lebih lanjut. Saran-saran ini dirancang untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang disajikan sebagai berikut:

1. Perlu memperkuat program pengentasan kemiskinan dengan fokus pada pemutusan siklus kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Program ini harus dirancang untuk menjangkau wilayah dengan tingkat IPM rendah dengan alokasi sumber daya yang memadai dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal.
2. Meskipun peningkatan TPAK penting, kebijakan tenaga kerja harus diarahkan pada peningkatan kualitas pekerjaan. Pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, dan memastikan distribusi pendapatan yang merata untuk mendukung pencapaian standar hidup layak.

DAFTAR PUSTAKA

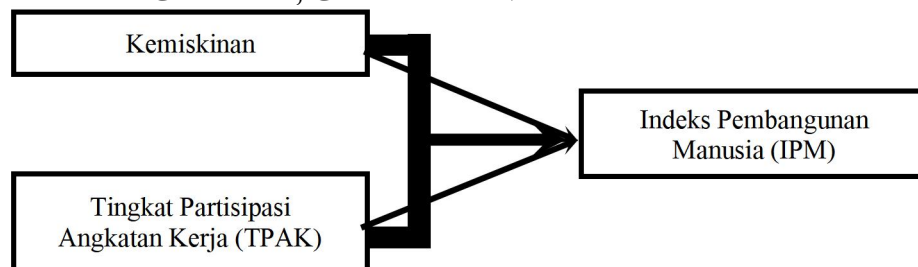
- Afgani, K. F., Rivanda, A. K., & Purbayati, R. (2021). Predicting Corporate Bankruptcy: Based on MDA Textile and Garment on Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(2), 1918-1932.
- Cahyanti, N. D., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Faktor-Faktor Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 93–101. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11036>
- Cholifah, N. (2024). Analysis of Determinants Influencing the Labor Force Participation Rate (LFPR) of Women in East Java Province for the Years 2018-2022. *Jambura Equilibrium Journal*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.37479/jej.v6i1.22558>
- Dewi, F. P., Rachman, B., & Rivanda, A. K. (2024). Peran Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Nasabah, Citra, Dan Kepuasan Nasabah Dalam Mendapatkan Loyalitas Nasabah Pada Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 2530-2546.
- Endang, E., & Anam, M. S. (2024). Menuju Ibu Kota Baru: Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 652–661. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1475>
- Faelassuffa, A., & Yuliani, E. (2022a). Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19979>
- Faelassuffa, A., & Yuliani, E. (2022b). Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19979>
- Federova, T., Simanjuntak, B., Zuhriadi, M., Habeahan, J., Lubis, R. J., Posma, T., Hutapea, U., Sirait, M. M., & Ekonomi, P. I. (2024). Pengaruh Angka Harapan Hidup Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4012–4019. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Ferdi. (2022). Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(01), 26–33. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i01.250>

- Ginting, D. I., & Lubis, I. (2023). Pengaruh Angka Harapan Hidup Dan Harapan Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 519–528. <https://doi.org/10.46576/bn.v6i2.3884>
- Irawan, E. (2022). The Effect of Unemployment, Economic Growth and Human Development Index On Poverty Levels In Sumbawa Regency In 2012-2021. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6, 1286–1291. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.5455>
- Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2023). What Drives Experiential Loyalty Towards the Islamic Banks ? Evidence From Indonesia. *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, 4(16), 12–29. <https://doi.org/10.35631/aijbes.516002>
- Karo, R. U. K. (2023). Analisis Pengaruh IPM, UMP Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 451–463. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.113>
- Kartika, M., Kurniasih, E. P., Dosinta, N. F., & Wahid, W. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat: Perspektif Ekonomi Islam. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 23(1), 59–71. <https://doi.org/10.22225/we.23.1.2024.59-71>
- Khairunnisa, I., Yusnita, F., Suryani, I. W., & Panorama, M. (2023). Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. *journal.stiemb.ac.id*, 7(3), 1735–1750. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3557>
- Maharani, J., & Yuliana, I. (2023). Journal of Economics, Finance and Management Studies Effect of Unemployment Rate, Education on Human Development Index which is Mediated by Poverty. *JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT STUDIES*, 6(5). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i5-37>
- Maulana, M. A., Rivanda, A. K., & Siswanto, N. R. (2024). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Karyawan PT. FVS Arthadarma Indonesia. *CAKRAWALA Repositori IMWI*, 7(5), 1386–1399.
- Maulina, U., & Andriyani, D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Tpak Terhadap Ipm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3171>
- Nastiti, A. W., & Nailufar, F. (2024). Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 06(3), 2023. <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15178>
- Oktaviani, N., Handayani, D., Wati, H., & Zaki. (2024). Pengaruh Kemiskinan dan Prevalensi Stunting terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 569–574. <https://doi.org/10.37034/infeb.v6i3.928>
- Pakpahan, R., Purbayati, R., Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2022). Pemodelan Volatilitas Indeks Saham Infobank 15 Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1124–1138
- Pratama, C. L., & Mandai, S. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa

- Barat. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 241–248.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15352>
- Purbayati, R., Afgani, K. F., & Rivanda, A. K. (2021). A Review: Product Pricing of Islamic Banking in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 6(3), 84–91. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.3.856>
- Purbayati, R., Rivanda, A. K., Afgani, K. F., & Pakpahan, R. (2022). Are Banking Industry More Resilient Against the Covid-19 Pandemic in Indonesia? *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, 4(11), 23–41. <https://doi.org/10.35631/aijbes.411003>
- Putri, O. E., Astuty, S., & Kamaruddin, C. A. (2024). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. *Inovasi Makro Ekonomi (IME)*, 6(4).
- Ramadhan, R., Widuri, A., & Rivanda, A. K. (2024). Komparatif Pembiayaan Syariah Sektor Perikanan Sebelum Dan Sesudah Merger, Implikasi Pembiayaan, Indeks Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Nelayan. *Buana Ilmu*, 8(2), 229–240.
- Rifa, A. L., & Waluyo, A. (2023). *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi; Pengaruh Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020*. 12.
- Rivanda, A. K., Abirukmana, R. P., & Dwiastuti, S. S. (2023). Pengaruh Nilai Perusahaan Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Textile Dan Garment Yang Terdaftar Di BEI. *Buana Ilmu*, 8(1), 34–55.
- Rivanda, A. K., Afgani, K. F., Purbayati, R., & Marzuki, M. M. (2023). The Effect of Liquidity, Leverage, Operating Capacity, Profitability, and Sales Growth as Predictors of Financial Distress:(Property, Real Estate, and Construction Services Companies Listed on the IDX). *Journal Integration of Management Studies*, 1(1), 13-21.
- Rivanda, A. K., Akbar Ilham Arif, I., & Ramadhan, R. (2022). Pengaruh BI Rate Dan Inflasi Terhadap IHSG Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 1828-1841.
- Rivanda, A. K., & Dwiastuti, S. S. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas). *Buana Ilmu*, 8(2), 97–109.
- Rivanda, A. K., & Muslim, A. I. (2021). Analisis Perbandingan Model Prediksi Financial Distress pada Sub Sektor Textile dan Garment. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 485-500.
- Rizaldi, M. (2024). Modeling of Economic Growth Rate in West Nusa Tenggara Province with Longitudinal Kernel Nonparametric Regression. *Eigen Mathematics Journal*, 7(1), 50–55. <https://doi.org/10.29303/emj.v7i1.188>
- Sakinah, N., Ihlasia, N., Nurfitri, Sagap, M., Rachman, R., & Handayani, L. (2023). Analysis of The Effect of Life Expectancy (AHH) and Per Capita Expenditure on The Human Development Index (HDI) in Central Sulawesi Province in 2019. *Parameter: Journal of Statistics*, 2(3), 32–37. <https://doi.org/10.22487/27765660.2022.v2.i3.15373>

- Suhendi, S., & Astuti, I. P. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pdrb Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Ipm Di Provinsi Papua Tahun 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1676–1694. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3212>
- Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 6(3), 16720–16729. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i3.5550>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

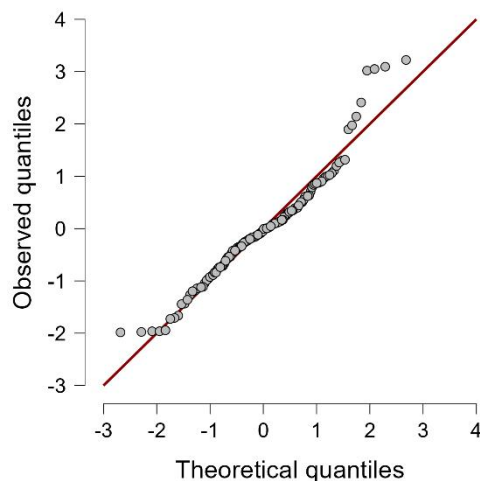


Gambar 1. Paradigma Penelitian

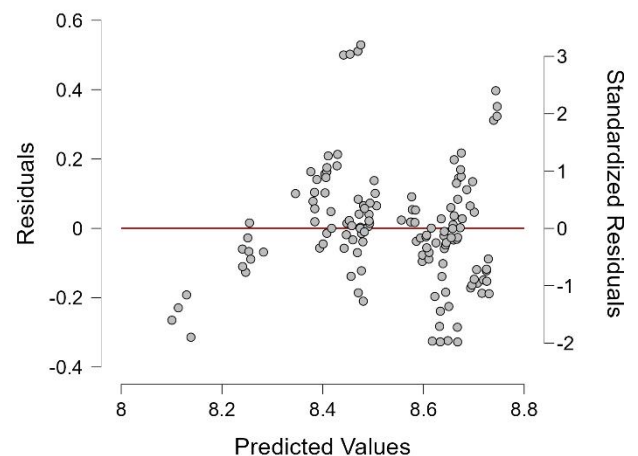
Tabel 1 Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	136	61,22	83,55	72,9217
Kemiskinan	136	4,25	27,38	10,4053
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	136	62,15	78,29	68,5381

Gambar 2 Uji Normalitas



Gambar 3 Uji Homogenitas



Tabel 2 Model Summary - IPM

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	Durbin-Watson		
					Autocorrelation	Statistic	p
Mo	0.000	0.000	0.000	0.224	0.412	1.124	< .001

Tabel 2 *Model Summary - IPM*

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	Durbin-Watson		
					Autocorrelation	Statistic	p
M ₁	0.673	0.453	0.445	0.167	0.150	1.684	0.059

Note. M₁ includes Kemiskinan, TPAK

Tabel 3 *ANOVA*

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
M ₁	Regression	3.055	2	1.528	55.034	< .001
	Residual	3.692	133	0.028		
	Total	6.747	135			

Note. M₁ includes Kemiskinan, TPAK

Note. The intercept model is omitted, as no meaningful information can be shown.

Tabel 4 *Coefficients*

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics	
							Tolerance	VIF
M ₀	(Intercept)	8.537	0.019		445.301	< .001		
M ₁	(Intercept)	9.761	0.609		16.041	< .001		
	Kemiskinan	-0.187	0.020	-0.641	-9.136	< .001	0.836	1.196
	TPAK	-0.077	0.076	-0.071	-1.013	0.313	0.836	1.196